

PERAN SEKRETARIAT DAERAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR KABUPATEN INDRAGIRI HULU

***Fadlan Rizky Zalvi¹ & Zainal²**

^{1,2} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

*Email Korespondensi: fadlanrizkyzalvi@student.uir.ac.id

Abstract

According to Government Regulation Number 17 of 2018 concerning Sub-Districts, Article 10 letter (c) states that the Sub-District Head (Camat) has the authority to coordinate the implementation of public order and security within their jurisdiction. In practice, this coordination includes responsibilities related to regional stability, continuity of inter-agency processes, systematic regulation, unity of action, and achieving common goals. As an extension of the regional government, the Camat plays a strategic role in aligning various community elements, village officials, as well as vertical institutions such as the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the National Police (Polri) to address issues related to public order. This study employed a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observation, and documentation involving informants such as the Camat, Head of Public Order (Kasi Trantibum), village heads (Lurah), community leaders, and security personnel. The results showed that the Camat of Pinggir Sub-District has regularly coordinated with related institutions, although several challenges remain. These include a lack of reports from neighborhood units (RT/RW), low community involvement, and weak supervision of social issues such as covert prostitution and alcohol distribution. Additionally, the lack of structured directives to field officers has hindered coordination effectiveness. Therefore, strengthening cross-sectoral communication and actively involving all stakeholders are necessary.

Keywords: Role, Regional Secretariat, and performance of the apparatus

PENDAHULUAN

Setiap Aparatur Sipil Negara harus memiliki jiwa korps dan kode etik sesuai aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Yang dimaksud dengan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus abdi negara dan abdi masyarakat pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang sangat penting, Menurut Elim riedel crhismast pio (Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN : 111) yaitu sebagai perencana , pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam hal ini sangat jelas bahwa kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil sangat penting. Sebagaimana yang dikemukakan didalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5

Tahun 2014 tentang ASN dan peraturan pemerintah tentang kepegawaian baru. Sumber daya manusia sebagai penentu dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam suatu organisasi. Sebagaimana Menurut Irfan Rama dkk (2020:490) keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada peran manusia sebagai sumber daya yang potensial dan sumber kekuatan untuk menggerakkan roda aktivitas organisasi. Kualitas sumber daya manusia ini sangat erat kaitannya dengan kinerja (Performance). Maka dari itu dalam organisasi dibutuhkan pegawai yang dapat bekerja lebih baik dan cepat serta pegawai yang mempunyai kinerja, Mujibul dan Rudi (Satria Tahir, 2013: 2).

Apabila Pegawai mempunyai keterampilan dan keahlian yang cukup memadai maka tingkat keberhasilannya sangat memuaskan, maka para pemimpin harus mempunyai perhatian khusus terhadap peningkatan Kinerja dari Pegawai yang dimilikinya. Era reformasi dan dampak persaingan globalisasi mendorong percepatan perubahan perbaikan Kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah dituntut bekerja lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintah (Dewi, 2013: 1).

Kemudian pada Pasal 2 disebutkan bahwa pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan bertujuan untuk: 1) Membina karakter atau watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil; 2) Mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, dan abdi masyarakat; dan 3) Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Haudi (2021: 1) sebuah sistem pemerintahan dibuat demi terselenggaranya pemerintahan negara yang mampu mewujudkan tujuan sebuah bangsa, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itulah, pemerintah bertugas mengatur dan mengarahkan kehidupan bersama dengan cara membuat hukum, melaksanakan dan menegakkannya, serta melakukan upaya-upaya lain demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Secara umum, aparatur merupakan perangkat pemerintah yang memiliki sistem aturan dan terstruktur, yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di tingkat Pusat atau Daerah (Nurcholis, 2005: 117). Secara mendasar perubahan sikap aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat sangat terkait dengan program-program penyempurnaan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah. Pemerintah Daerah merupakan organisasi pelayanan masyarakat. Dengan demikian harus memberikan citra yang baik dengan kinerja yang baik pula. Kinerja yang tinggi mencerminkan keadaan pegawai yang dapat bekerja dengan baik dan penuh tanggungjawab serta konsentrasi untuk bekerja. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Hal tersebut merupakan faktor yang penting untuk mencapai keberhasilan sebuah instansi dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, maka instansi harus lebih memperhatikan dan memotivasi tenaga kerjanya secara efektif dan efisien dan mendapatkan hasil pekerjaan yang optimal, dengan demikian tujuan dari instansi akan dapat tercapai. Namun kenyataan yang terjadi di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak berjalan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

Sangat disadari masih diperlukannya perbaikan pada berbagai bidang untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai oleh Bagian Tata Pemerintahan dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang terbatas dalam pelaksanaan kegiatan. Terhadap hal tersebut, dalam usaha lebih meningkatkan kinerja aparat Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, ditahun-tahun mendatang akan diusahakan berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang berpengaruh terhadap kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana otonomi daerah mempunyai beban dan tanggung jawab yang lebih, tentu mengandung konsekwensi logis yaitu anggaran belanja maupun anggaran pendapatan, termasuk dalam kewenangan membuat kebijakan daerah. Pemerintahan yang akuntabel dan efisien dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala yaitu, pertama faktor organisasi dan manajemen penyelenggaraan otonomi daerah, diantaranya dengan semakin banyaknya dinas, kantor dan lembaga baru yang dibentuk dengan jumlah jabatan struktural/fungsional bertambah banyak tapi miskin fungsi, sehingga terjadi duplikasi tugas dan fungsi antara dinas/instansi/lembaga yang hampir mempunyai kesamaan antara satu dengan yang lain, dan menjadi beban anggaran belanja daerah.

Hasil pengamatan di lapangan terlihat bahwa Pemerintah kota selaku pengatur wilayah setempat tentunya perlu memberikan layanan yang responsif yakni dengan memberikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap adanya pelayanan publik oleh aparat yang mana hal ini merupakan sebuah hal yang harus dilakukan seiring dengan tingginya kebutuhan serta tuntutan masyarakat mengenai pelayanan publik yang baik dan pengaduan masyarakat yang terkondisikan. Namun Di Kantor Bupati Inhu masyarakat dibuat bingung dengan adanya layanan pengaduan yang sekarang yaitu pengaduan masih bersifat manual yang tentunya dapat berdampak pada waktu, biaya serta tenaga yang dikeluarkan, sehingga dengan layanan pengaduan yang masih bersifat manual tentunya masih dinilai kurang efektif dan efisien untuk menindaklanjuti sebuah pengaduan. Sehingga dalam mengoptimalkan hal tersebut tentunya perlu dibuat sebuah digitalisasi layanan pengaduan terlebih lagi dengan seiring pesatnya teknologi.

Kajian ini memandang pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan dan menjalankan roda pemerintahan, sementara yang diperintah adalah masyarakat yang menjadi subjek dari kebijakan tersebut. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hubungan pemerintah dan yang diperintah dapat berjalan efektif, efisien, dan demokratis, serta bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Lebih khusus pada sekretariat daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat sekretariat daerah di bawah pengawasan oleh sekretaris daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) mempunyai peranan penting dalam mengawal proses perubahan dengan melakukan gerakan reformasi birokrasi. penataan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu masih belum sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki oleh Aparatur yang bersangkutan. Kondisi demikian menggambarkan masih kurangnya kompetensi dalam hal kemampuan dan keterampilan aparat di Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selaku unsur penunjang dalam pemerintahan daerah sehingga menghambat pelaksanaan penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Mutasi pegawai, pendidikan dan pelatihan pada dasarnya dilaksanakan untuk pengembangan pegawai dengan memberikan pengalaman dan wawasan yang lebih kepada aparat dalam bekerja yang aparat sendiri tidak mendapatkannya di tempat bekerja sebelumnya justru tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Berdasarkan uraian masalah diatas maka untuk mewujudkan Kinerja Aparatur yang

optimal, maka dibutuhkan langkah strategis oleh sekretaris daerah selaku pemimpin di lingkungan sekretariat Daerah.

Namun dari pengamatan peneliti dilapangan terdapat permasalahan terkait pembangunan di kecamatan Seberida: 1) Jabatan Aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu masih belum sesuai dengan latar belakang pendidikan; 2) Masih kurangnya kompetensi dalam hal kemampuan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu seperti dalam bekerja selalu menunggu perintah atasan. Artinya kalau diperintah oleh atasan baru bekerja tetapi setelah atasan tidak memerintahkan maka mereka tidak bekerja; 3) Kurangnya disiplin kerja aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu khususnya pada jam masuk kerja seperti Masih banyak dijumpai pegawai yang kurang kesungguhannya dalam melaksanakan pelayanan. Seperti disaat pada jam-jam kerja banyak pegawai yang ngobrol, baca Koran, merokok dikantin dan diruangan.

Lemahnya Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Dearah Kabupaten Indragiri Hulu pada khususnya sebagai Sumber Daya aparatur pemerintah saat ini, antara lain disebabkan konsep pembinaan dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil masih diartikan sempit, yaitu hanya sebatas pembinaan dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang berorientasi pada kebutuhan birokrasi pemerintah semata, potensi Pegawai Negeri Sipil belum dikembangkan sepenuhnya, sikap mental dan budi pekerti, etos kerja dan produktivitas kerja serta kreativitas kurang dibina dan dikembangkan bahkan cenderung merosot akibatnya, ada Pegawai Negeri Sipil yang kurang peka dalam melayani dan memenuhi aspirasi masyarakat, tidak produktif, kurang kreatif, motivasi kerja rendah, kurang sportif, kehilangan jati diri, serta tidak mempunyai arah dan program kerja. Hal-hal tersebut pada akhirnya menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Hal ini bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengkajian hipotesis, melainkan pada usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentative (Syarifudin Azwar, 2002: 5). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif tentang segala fenomena sosial yang diteliti, yaitu mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan tentang Peran Sekretariat Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian adalah terindikasi jabatan Aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu masih belum sesuai dengan latar belakang pendidikan. Terindikasi masih kurangnya kompetensi dalam hal kemampuan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu seperti dalam bekerja selalu menunggu perintah atasan. Artinya kalau diperintah oleh atasan baru bekerja tetapi setelah atasan tidak memerintahkan maka mereka tidak bekerja. Terindikasi kurangnya disiplin kerja aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu khususnya pada jam masuk kerja seperti Masih banyak dijumpai pegawai yang kurang kesungguhannya dalam melaksanakan pelayanan. Seperti disaat

pada jam-jam kerja banyak pegawai yang ngobrol, baca Koran, merokok dikantin dan diruangan. Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan (H.B. Sutopo, 2006:60). Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Bidang Tata Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, Pegawai Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisa data adalah Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

PEMBAHASAN

Koordinasi Camat dalam Kegiatan

Dalam suatu organisasi, setiap pemimpin harus melakukan koordinasi kegiatan yang dipercayakan kepada anggota organisasi untuk melaksanakan tugas. Memberikan informasi yang jelas, komunikasi yang memadai, dan distribusi pekerjaan di antara bawahan oleh manajer masing-masing atau orang-orang yang berada di bawahnya akan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kewenangan yang diterimanya. Oleh karena itu, tanpa koordinasi kerja setiap karyawan tujuan perusahaan tidak akan tercapai Hasibuan (2006: 85).

Koordinasi dapat dimaknai sebagai proses yang melibatkan pengarahan, penyatuan, serta penyelarasan seluruh elemen manajerial dan tenaga kerja di bawahnya, dengan tujuan untuk mencapai sasaran organisasi secara maksimal. Handoko (2003:195) menyatakan bahwa koordinasi merupakan mekanisme penyatuan antara tujuan dan aktivitas dari unit-unit yang berbeda dalam suatu struktur organisasi, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas kerja yang optimal.

Senada dengan itu, G.R. Terry dalam Hasibuan (2006:85) menekankan bahwa koordinasi adalah usaha yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir, baik dalam jumlah, waktu, maupun pelaksanaannya, agar tercipta hasil yang seragam, terarah, dan mendukung pencapaian tujuan bersama secara harmonis. Tujuan utama dari koordinasi adalah untuk menciptakan keselarasan dalam tindakan, yang pada akhirnya akan membantu menyatukan pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja antar komponen yang saling berhubungan dalam suatu organisasi. Menurut Dimock, koordinasi berperan sebagai elemen aktif dalam administrasi, karena sebagaimana sistem fisiologis dalam tubuh manusia, keberhasilan dan daya kerja suatu sistem sangat bergantung pada keterkaitan dan interaksi antar bagian di dalamnya. Koordinasi juga merupakan bagian dari administrasi yang kompleks karena melibatkan berbagai persoalan dan dinamika yang tidak sederhana.

Menurut Dr Awaluddin Djamin. MPA. Koordinasi adalah sebuah upaya kerjasama antar instansi, badan, unit dalam melaksanakan tugas tertentu agar mereka rukun, saling memahami, saling membantu dan menolong dalam menyelesaikan tugas. Dalam suatu organisasi, tugas-tugas dibagibagi terdepartemenalisasi, namun para manajer masih perlu berkoordinasi kegiatan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Kapasitas Koordinasi manajer yang efektif sangat bergantung pada bawahan atau anggota organisasi untuk mewujudkan dan memenuhi komitmennya terhadap organisasi. Menurut

Yahya Yohanes, koordinasi adalah proses integrasi tujuan dan kegiatan di unit-unit berbeda dalam suatu organisasi mencapai tujuan organisasi secara efektif (Hardjito (2001:47). Menurut Leonard.d.White, ini artinya Koordinasi adalah pengaturan setiap bagian dan upaya untuk memindahkan dan mengoperasikan bagian-bagian pada saat yang bersamaan disesuaikan, sehingga setiap ruangan dapat menyediakan kontribusi terbesar terhadap hasil keseluruhan.

Keberadaan kecamatan sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah memberikan peran penting kepada Camat sebagai pimpinan tertinggi di wilayah tersebut. Camat memiliki tanggung jawab utama dalam mengoordinasikan seluruh urusan pemerintahan, memberikan pelayanan publik, serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan kecamatan, termasuk di tingkat desa dan kelurahan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan merupakan salah satu wilayah administratif dalam struktur pemerintahan daerah yang berada di bawah kewenangan kabupaten atau kota. Wilayah ini dipimpin oleh seorang Camat yang secara struktural bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Camat juga berperan penting dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayahnya, serta menegakkan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah.

Di samping itu, Camat juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan mengelola sarana serta prasarana pelayanan publik, melaksanakan berbagai urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain tugas-tugas tersebut, Camat juga diberi wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota yang belum ditangani oleh perangkat daerah di wilayah kecamatan, serta menjalankan tugas lain yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara substansial, keamanan merupakan suatu konsep yang mencerminkan upaya pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat secara seimbang dan selaras antara aspek kesejahteraan dan stabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara etimologis, keamanan dapat diartikan sebagai kondisi di mana masyarakat terbebas dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, atau hambatan yang dapat mengganggu ketenangan hidup.

Sementara itu, ketertiban mengacu pada keadaan di mana seluruh aktivitas sosial berlangsung sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, sehingga setiap elemen masyarakat dapat menjalankan fungsi dan perannya secara tertib dan teratur. Ketertiban merupakan elemen penting yang harus diwujudkan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Menurut pandangan Madjloes (dalam Rauf, 2005:6), ketertiban dipahami sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang tercipta dari kesepakatan terhadap aturan-aturan, baik yang tertulis maupun tidak, yang diterapkan dan dijalankan secara bersama oleh seluruh anggota masyarakat.

Abdussalam (2007:104) mendefinisikan keamanan sebagai bentuk perlindungan terhadap individu dari segala bentuk tindakan kekerasan atau perlakuan yang bersifat kejam, termasuk penghinaan fisik maupun psikologis, serta serangan yang merusak integritas moral seseorang, seperti fitnah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketenteraman dan ketertiban umum sangat berkaitan erat dengan kondisi keamanan. Tanpa adanya rasa aman, mustahil tercipta situasi yang tenteram dan tertib. Kedua kondisi ini saling melengkapi dan hanya dapat diwujudkan apabila

keamanan terjaga secara menyeluruh. Jadi untuk mengetahui bagaimana koordinasi camat mengenai keamanan dan ketertiban di Kecamatan Pinggir Penulis menggunakan. Kemudian unsur koordinasi untuk Leonard D White dalam Jurnal (Ranggi, 2015: 44) adalah sebagai berikut:

Penyesuaian

Dalam indikator penyesuaian dilakukan penelitian dengan melihat dua objek antara lain sebagai berikut; a) Pengertian, fungsi dan pentingnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir; b) Penyesuaian koordinasi camat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir; c) Penerapan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir.

Analisa terkait penyesuaian Pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan pinggir kami lakukan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Bersama satpol PP, Polsek TNI, pemuka agama serta juga di harapkan peran aktif masyarakat. Di mana berkaitan dengan keamanan pihak kepolisian wilayah polasek merupakan tokoh penting atau memiliki peran sentral dalam pelaksanaan keamanan di kecamatan serta untuk pelaksanaan di lingkungan waga maka dilakukan sosialisasi oleh camat kepa lurah dan kemudian setelah itu barulah lurah menyampaikan informasi kepada masyarakatnya melalui RT dan RW.

Hasil wawancara dan obeservasi penulis menunjukkan bahwa memang kepala desa, seksi trantibum dan masyarakat telah menerima koordinasi dan sosialisasi dari camat. Namun, belum ada upaya optimal atau tindakan tegas yang dilakukan oleh camat melainkan hanya himbauan dan peringatan

Operasi (Proses)

Dalam indikator pembahasan mengenai operasi ada dua poin yang akan dilihat yang antara lain adalah sebagai berikut: a) Proses pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir; b) Proses pengembangan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Masyarakat ataupun pihak desa telah menyampaikan laporan kepada Camat dan Aparat Kepolisian terkait kondisi ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sebagai bagian dari proses koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun, laporan tersebut hingga kini belum mendapatkan tindak lanjut atau solusi konkret dari pihak kecamatan dan kepolisian sehingga upaya menciptakan lingkungan yang tertib dan tenteram belum dapat terlaksana secara optimal.

Salah satu isi laporan yang disampaikan dalam konteks penelitian ini adalah terkait keberadaan usaha kafe yang diduga menyalahgunakan izin operasionalnya dan berpotensi mengarah pada praktik prostitusi terselubung dan menyediakan miras. Kafe tersebut dinilai sangat meresahkan warga karena beroperasi hingga dini hari dengan kegiatan karaoke yang bising, serta banyaknya perempuan malam yang terlihat di lokasi tersebut. Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama bagi keluarga yang merasa terganggu dengan kebiasaan para pemuda yang sering menghabiskan waktu di tempat itu. Keberadaan kafe tersebut jelas bertentangan dengan prinsip ketertiban dan ketentraman yang seharusnya dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu maraknya kasus pencurian dan

diduga adanya tempat praktik penggunaan narkoba tentunya membuat Masyarakat tidak lagi merasakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggalnya.

Menanggapi keresahan warga, pihak kecamatan seharusnya dapat mengambil langkah-langkah konkret dalam menangani persoalan ini. Proses penanganan perlu melibatkan berbagai unsur terkait agar solusi yang diambil dapat menyentuh akar masalah. Melalui laporan yang diterima dari pemerintah desa maupun masyarakat, kecamatan diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan secara tepat dan merumuskan penyelesaian yang sesuai demi menjaga stabilitas sosial di tingkat desa.

Penulis melakukan observasi dengan hasil pengamatan sebagai berikut: ada dijumpai beberapa pelanggaran keamanan yang terjadi di titik-titik tertentu yang membutuhkan perhatian dari camat berserta jajarannya karena kalau tidak segera di tertibkan maka hal tersebut akan menjadi penyakit Masyarakat yang semakin menjamur di daerah pinggir. bersama dengan polisi, TNI pemuka agama dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. ada dijumpai beberapa pelanggaran keamanan seperti adanya rumah atau cafe-cafe yang diduga sebagai lokasi prostitusi yang jumpai di titik-titik tertentu yang membutuhkan perhatian dari camat berserta jajarannya karena kalau tidak segera di tertibkan maka hal tersebut akan menjadi penyakit Masyarakat yang semakin menjamur di daerah pinggir.

Waktu yang tepat

Berbicara tentang waktu yang tepat Waktu penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir akan di lihat melalui pengamatan penelitian. Dari pernyataan Camat Pinggir, dapat disimpulkan bahwa menurut Camat Pinggir, penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman tidak dibatasi oleh waktu tertentu, melainkan harus menjadi prioritas utama setiap saat. Kesigapan dan koordinasi lintas sektor, termasuk peran serta masyarakat, dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga stabilitas wilayah.

Penulis melakukan observasi dengan hasil pengamatan sebagai berikut: pelaksanaan penertiban keamanan lingkungan ini harus dilakukan setiap saat karena pelanggaran dan kejahatan dapat terjadi kapanpun. Dari hasil wawancara dan observasi penulis membuat sebuah Analisa mengenai indikator waktu yang tepat antara lain sebagai berikut: dengan demikian tidak ada waktu yang tepat untuk pelaksanaan keamanan namun setiap saat keamanan dan ketertiban harus di jaga karena pelanggaran dan kejahatan dapat terjadi kapan saja maka dengan demikian Camat, Instansi Pemerintahan lainnya, TNI dan Polri serta Masyarakat harus menjamin keamanan setiap saat.

Kontribusi maksimal

Meninjau tentang kontribusi maksimal di titik beratkan pada dua poin sebagai berikut: a) Perubahan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir; b) Pengaruh adanya program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir terhadap keamanan dan ketentraman masyarakat.

Masing-masing institusi memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Satpol PP menekankan pada penegakan perda, TNI melalui pembinaan dan pendekatan sosial masyarakat, sementara Polri lebih menitikberatkan pada penegakan hukum dan penanganan gangguan kamtibmas secara langsung.

Koordinasi yang baik antarinstansi ini menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Pinggir.

Hasil (produk)

- a. Penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Pinggir sudah berjalan dengan baik.
- b. Nilai keberhasilan Koordinasi Camat dalam pelaksanaan Trantibumlinmas

Dari serangkaian wawancara dengan masyarakat, dapat ditarik Kesimpulan bahwa:

- a. Penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman sudah menunjukkan kemajuan di beberapa aspek, terutama dengan menurunnya gangguan langsung seperti kebisingan atau kegiatan remaja yang mengganggu kenyamanan lingkungan.
- b. Masyarakat mengapresiasi keberadaan aparat dan upaya Camat, namun menilai bahwa respon terhadap laporan warga masih belum optimal.
- c. Beberapa warga merasa bahwa koordinasi antarinstansi sudah berjalan, tapi pelaksanaannya belum sepenuhnya dirasakan dampaknya di tingkat bawah, terutama dalam penanganan kasus yang berulang seperti tempat hiburan malam ilegal dan gangguan kebisingan.
- d. Masyarakat berharap koordinasi yang dilakukan Camat dapat diperkuat lagi dengan sistem pelaporan yang lebih transparan serta tindakan yang cepat dan tegas terhadap laporan masyarakat. Hal ini penting agar ketentraman dan ketertiban benar-benar dirasakan oleh seluruh warga secara merata.

Kekurangan dalam pelaksanaan Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum (trantibumlinmas), Kecamatan Pinggir masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang signifikan, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor.

Kendala Koordinasi Trantibum di Kecamatan Pinggir, yakni Adalah sebagai berikut: 1) Laporan dari Desa atau Kelurahan tidak selalu ditindaklanjuti, meskipun sudah disampaikan secara berkala kepada Camat; b) Pemilik café dan tempat hiburan malam sulit diajak bekerja sama, bahkan beberapa di antaranya menyembunyikan kegiatan ilegal di balik usaha resmi seperti warung kopi atau karaoke; c) Lemahnya sistem pelaporan dari Masyarakat dan RT/RW, yang seharusnya menjadi ujung tombak pengawasan di tingkat lingkungan, menyebabkan informasi tidak sampai ke tingkat kecamatan; d) Tidak adanya BPD di kelurahan, menyebabkan suara dan keluhan masyarakat tidak tersampaikan dengan sistematis sebagaimana di desa. Informasi yang diterima sering tidak disertai bukti, sehingga pihak kecamatan sulit untuk melakukan penindakan langsung.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terkait peran Sekretariat Daerah dalam meningkatkan kinerja aparatur Kabupaten Indragiri Hulu dengan berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari Peran Antar pribadi (Interpersonal Role) berperan sebagai yang memberikan fasilitasi dan melakukan koordinasi antar instansi. Informasi (Informational Role) berperan sebagai berfungsi sebagai pusat kegiatan administrasi dan koordinasi pemerintahan daerah, membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan memberikan pelayanan administratif. Peranan Pengambil Keputusan (Decisional Role) berperan sebagai meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang transparan, efisien dan efektif, melalui pemanfaatan teknologi informasi. Faktor-faktor penghambat dalam peran Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Indragiri Hulu dalam meningkatkan kinerja aparatur secara umum meliputi Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan Kebutuhan Pelatihan dan Pengembangan yang Belum Terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Aidil Fitria Wati. 2013. Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- H.B. Sutopo. 2006. Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Haudi. 2021. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Solok : Insan Cendekia Mandiri
- Irfan Rama dkk. 2020. Metode Penelitian Sosial. Edited by Indra Pradana Kusuma. Kota Batam: yayasan cendekia mulia mandiri
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya
- Nurcholis, Hanif. 2005. Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo
- Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 29 Tahun 2023 Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
- Satria Tahir. 2013. Analisis Kinerja Karyawan pada PT. Sinar Galesong Pratama (SGP) Cabang Gorontalo. Jurnal KIM Ekonomi Dan Bisnis: Universitas Negeri Gorontalo
- Syaifudin Azwar. 2002. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset